

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu indikator keberhasilan suatu negara dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila Produk Domestik Bruto negara tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan negara tersebut sangat baik karena Produk Domestik Bruto yang tercermin gambarkan angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Produk Domestik Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode. Sedangkan yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto perkapita adalah Produk Domestik Bruto dibagi jumlah penduduk. Produk Domestik Bruto sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi Produk Domestik Bruto perkapita suatu negara, maka semakin besar pendapatan warga negara tersebut.

Meningkatnya produk domestik bruto di suatu negara merupakan ukuran keberhasilan kesejahteraan masyarakat yang merata di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil setiap tahun, berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan di suatu negara juga menurun. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi disuatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (Boediono, 2013).

Proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dapat

dikatakan, bahwa produk domestik bruto menyangkut perkembangan yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor yang merupakan indikator perekonomian atau disebut juga indikator ekonomi makro.

**Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)**

**Periode 2010 - 2019**

Tahun	PDB (Miliar Rp)
2010	6.864.133
2011	7.287.635
2012	7.727.083
2013	8.156.498
2014	8.564.867
2015	8.982.511
2016	9.433.034
2017	9.912.749
2018	10.034.781
2019	10.125.347

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB), bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2010 hingga 2019 naik secara signifikan, dimana pada tahun 2010 sebesar 6864133 dan terus meningkat di tahun 2019 sebesar 10125347. hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat selama 10 tahun terakhir dengan cukup baik.

Beberapa indikator yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) yang sering menjadi sorotan di antaranya adalah, Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Kurs dan Pajak. Berdasarkan aspek formal, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan aspek fungsinya,

pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan (Tribroto dalam Muhammad Iqbal, 2001).

**Tabel 1.2 Utang Luar Negeri (Juta US\$)**

**Periode 2010 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Utang Luar Negeri (Juta US\$)</b>
2010	202.413
2011	225.375
2012	251.200
2013	266.015
2014	293.328
2015	310.730
2016	320.006
2017	352.469
2018	377.827
2019	404.282

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019

Dari Tabel 1.2 diatas bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat utang luar negeri di tahun 2015 sebesar 310.730 (Juta US\$), dan di tahun 2016 utang luar negeri sebesar 320.006 (Juta US\$), dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 9.276 (Juta US\$), Tahun 2017 utang luar negeri sebesar 352.469 (Juta US\$), mengalami kenaikan sebesar 32.463 (Juta US\$), Tahun 2018 utang luar negeri sebesar 377.827 (Juta US\$) mengalami kenaikan sebesar 25.358 (Juta US\$), dan di tahun 2019 utang luar negeri sebesar 404.282 (Juta US\$) mengalami kenaikan sebesar 26.455 (Juta US\$). Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya utang luar negeri mengalami kenaikan setiap tahun secara signifikan.

Pinjaman luar negeri tergantung syarat-syarat pinjaman dari bantuan yang bersangkutan, yaitu berdasarkan tingkat suku bunga (*interest rate*), masa tenggang

waktu (*grace period*) – jangka waktu yang tidak perlu pencicilan utang serta jangka waktu pelunasan utang (*amortization period*) – jangka waktu dimana pokok utang harus dibayar lunas kembali secara cicilan. Utang luar negeri jika dimanfaatkan dan memaksimalkan penggunaannya sebaik mungkin akan berdampak positif untuk suatu negara, namun jika sebaliknya, maka akan menambah angka hutang yang tercatat di suatu negara tersebut. Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (*resident*) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (*non resident*). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF *External Debt Statistics: Guide for compilers and Users* (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia.

Untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, dibutuhkanlah investasi, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan dari luar negeri, biasa disebut penanaman modal asing (PMA) yang dimana salah satu cara untuk menutup defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Penanaman modal asing (PMA) adalah aliran modal asing yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio*). (Suyatno, 2003).

**Tabel 1.3 Penanaman Modal Asing (US\$)**

**Periode 2010 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>PMA (US\$)</b>
2010	15292009411
2011	20564938227
2012	21200778608
2013	23281742362
2014	25120732060
2015	19779127977
2016	4541713739
2017	20510310832

2018	18909826044
2019	24993551748

Sumber : World Bank

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PMA tahun 2010 s.d 2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan terjadi pada tahun 2014 sebesar 25120732060 US\$. sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016 sebesar 4541713739 US\$. Hal ini menunjukkan bahwa PMA selama 10 tahun terakhir mengalami perubahan yang berfluktuasi positif dan negatif hal ini menyebabkan investor asing masih memiliki keraguan dalam melakukan investasi/penanaman modal asing di Indonesia.

Dalam teori neo-klasik dikemukakan untuk membangun kinerja perekonomian suatu negara maka dibutuhkan akumulasi kapital (Kuncoro,2000). Negara berkembang lebih memerlukan investasi terutama asing karena pada umumnya tingkat tabungan domestik rendah (Sadli, 2002). Kobrin (1977) berpendapat bahwa khususnya investasi asing bisa dan memang berperan sebagai medium transfer kebutuhan akan sumber daya seperti teknologi, kemampuan manajerial, jalur ekspor dan modal dari negara-negara industri ke negara berkembang, oleh karena itu, investasi akan meningkatkan produktivitas dan terkait pula dengan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu variabel cukup penting mempengaruhi produk domestik bruto adalah nilai tukar (Kurs). terdapat hubungan negatif antara kurs dengan produk domestik bruto, dimana semakin tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan menyebabkan PDB (Produk Domestik Bruto) menurun. Yang dijelaskan dalam teori Mundell-Fleming ( Mankiw 2003 : 306-307).

**Tabel 1.4 Kurs (Nilai Tukar Rp/US\$)**

**Periode 2010 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Tukar (Rp/US\$)</b>
2010	8.991
2011	9.068
2012	9.670
2013	12.189
2014	12.440
2015	13.796
2016	13.436
2017	13.548
2018	14.481
2019	13.958

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019

Menurut Musdholifah & Tony (2007), nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misal kurs rupiah terhadap dollar Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu dollar Amerika. Sedangkan Triyono (2008), kurs (*exchange rate*) adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan nilai tukar rupiah adalah suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lain.

Dari data yang disajikan pada tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun nilai tukar rupiah terhadap dollar cenderung terdepresiasi, pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah Rp. 13.796 dan terus menurun pada tahun berikutnya hingga tahun 2019 nilai tukar rupiah berada pada Rp. 13.958/ dolar. Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (*kurs*) pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut Levi (1996), Akibatnya

timbul depresiasi dan apresiasi. Depresiasi mata uang negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Sedang apresiasi rupiah terhadap dollar AS adalah kenaikan rupiah terhadap dollar AS. Apresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri. Sukirno (2004).

Penerimaan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

**Tabel 1.5 Pajak (Miliar Rupiah)**

**Periode 2010 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak (Miliar Rupiah)</b>
2010	742.738
2011	850.255
2012	1.032.570
2013	1.192.994
2014	1.280.389
2015	1.379.992
2016	1.546.665
2017	1.498.871
2018	1.618.095
2019	1.786.379

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019

Berdasarkan data di atas, penerimaan pajak terlihat naik dari tahun ke tahun secara signifikan. Tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 1.379.992 (Miliar Rupiah),

yang dimana di tahun berikutnya mengalami kenaikan atas penerimaan pajak sebesar 166.673 (Miliar Rupiah), dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019, penerimaan pajak sebesar 1.786.379 (Miliar Rupiah). Pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, dan merupakan salah satu posisi yang vital. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 % dari total pendapatan negara. Ini secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kelangsungan suatu negara sangat bergantung pada pajak

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap produk domestik bruto Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh kurs terhadap produk domestik bruto Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh pajak terhadap produk domestik bruto Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri terhadap produk domestik bruto Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap produk domestik bruto Indonesia

4. Untuk menganalisis pengaruh pajak terhadap produk domestik bruto Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel terhadap produk domestik bruto Indonesia. Selain itu penulis juga menambah ilmu dan wawasan atas penelitian yang sedang penulis teliti. Sekaligus sebagai kemampuan tolak ukur dalam menganalisis untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta.
2. Bagi Pemerintah, dapat menjadi hal pertimbangan variabel yang digunakan untuk meningkatkan produk domestik bruto dalam mengambil kebijakan pengalokasian dana pembangunan di masa mendatang. Sehingga pembangunan Provinsi di Indonesia dapat diarahkan ke sektor-sektor yang potensial sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

